



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* sehingga perlu didukung dengan kebijakan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2023-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2023-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2023-2024.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Kabupaten adalah Kabupaten di Kalimantan Tengah.
5. Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama berbagai sektor di pusat, daerah, dan desa.
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
9. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersamasama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga dengan 1.000 (seribu) hari pertama kelahiran di lokasi dengan prioritas penanganan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Pelaksanaan Percepatan;
- c. Sasaran;
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pendanaan;
- f. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Konvergensi di tingkat Kabupaten dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi hingga 16,33 % (enam belas koma tiga tiga persen) pada tahun 2024.

[Handwritten signature]

BAB IV
PELAKSANAAN PERCEPATAN
Pasal 4

- (1) Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, yang dilaksanakan Pemerintah Daerah berpedoman pada pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pelaksanaan 5 (lima) pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah;
 - b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah;
 - d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pelaksanaan 5 (lima) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, dan penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi yang berpedoman pada Rencana Aksi Nasional.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. Penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;
 - b. Pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
 - c. Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usaha subur;
 - d. Surveilans keluarga berisiko *stunting*; dan
 - e. Audit kasus *stunting*.
- (3) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari program kerja perangkat daerah meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. Rencana pembangunan jangka menengah;
 - c. Rencana strategis; dan
 - d. Rencana kerja dan anggaran.

BAB V
SASARAN
Pasal 6

- (1) Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dilakukan melalui 2 (dua) sasaran:
 - a. Intervensi spesifik; dan

4/4/20

- b. Intervensi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan keluarga yang berisiko *stunting*.
- (3) Sasaran untuk intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Remaja;
 - b. Calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - c. ibu hamil;
 - d. Ibu nifas dan ibu menyusui; dan
 - e. Anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (4) Sasaran untuk intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga yang berisiko *Stunting*.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. Sistem manajemen data terpadu dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 8

Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 9

Pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2023-2024 bersumber dari :

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- 2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

14726 K

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2023-2024;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- (3) Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 24 Januari 2024

Pj. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 24 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 770

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 TERINTEGRASI TAHUN 2023-2024

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TAHUN 2023-2024

No	Rencana Aksi	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Operasional	Sasaran	Satuan	Tahun		PJ
						2023	2024	
Target Antara dalam Perpres 72 Tahun 2021								
1	Tersedianya Layanan Intervensi Spesifik	Tersedianya Layanan Intervensi Spesifik	1 Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Ibu hamil	Persen	90	90	Dinas Kesehatan
			2 Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Ibu hamil	Persen	80	80	Dinas Kesehatan
			3 Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Remaja Putri	Persen	58	58	Dinas Kesehatan
			4 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Bayi usia kurang dari 6 bulan	Persen	80	80	Dinas Kesehatan
			5 Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Anak usia 6-23 bulan	Persen	80	80	Dinas Kesehatan
			6 Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk	Persen	90	90	Dinas Kesehatan
			7 Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Anak berusia di bawah lima tahun (balita)	Persen	90	90	Dinas Kesehatan
			8 Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Anak berusia di bawah lima tahun (balita)	Persen	90	90	Dinas Kesehatan
			9 Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Anak berusia di bawah lima tahun (balita)	Persen	90	90	Dinas Kesehatan
2	Tersedianya Layanan Intervensi Sensitif	Tersedianya Layanan Intervensi Sensitif	1 Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan	Ibu pasca persalinan	Persen	70	70	DP3AP2PKB
			2 Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	PUS (15-49 tahun)	Persen	15,5	15,5	DP3AP2PKB
			3 Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Calon Pasangan Usia Subur (PUS)	Persen	90	90	DP3AP2PKB
			4 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	rumah tangga	Persen	100	100	DPUPR
			5 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	rumah tangga	Persen	90	90	DPUPR
			6 Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	Penduduk	Jumlah	112,9 juta	112,9 juta	Dinas Kesehatan

			7	Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan	Keluarga Berisiko Stunting	Persen	90	90	DP3AP2PKB
			8	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Keluarga miskin dan rentan	Jumlah	9553	10500	Dinas Sosial
			9	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas	Keluarga sasaran	Persen	70	70	Dinas Kesehatan
			10	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Keluarga miskin dan rentan	Jumlah	13215	14500	Dinas Sosial
			11	Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (PDF)	desa/kelurahan	Persen	90	90	Dinas Kesehatan
No	Rencana Aksi	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Operasional	Sasaran	Satuan	Tahun		PJ	
						2023	2024		
Indikator dalam Perpres 72 Tahun 2021									
1	Pilar 1 : Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan stunting	1	Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah	1	1	Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara
			2	Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	Pemda Kab/Kota	Jumlah	1	1	Pemda Kab/Kota
			3	Terselenggaranya Rembuk Stunting tingkat kecamatan	Pemda Kab/Kota	Jumlah	2	2	Pemda Kab/Kota
			4	Terjadinya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting	Pemda Kab/Kota	Jumlah	-	-	Pemda Provinsi
			5	Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	Bidan desa/kelurahan	Persen	100	100	Pemda Kab/Kota
			6	Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting	desa/kelurahan	Persen	100	100	Pemda Kab/Kota
			7	Persentase pemerintah daerah provinsi yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting	Pemerintah daerah provinsi	Persen	100	-	Kementerian Dalam Negeri
			8	Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting	pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	100	-	Pemda Provinsi
		b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa	1	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan PPS	Pemerintah desa/kelurahan	Jumlah	-	-	Pemda Kab/Kota
			2	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah	10	10	Dinas Sosial
			3	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota	desa/kelurahan	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota (DPMD)

164/2021

No	Rencana Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Operasional	Sasaran	Satuan	2023	2024	PJ
2	Pilar 2 : Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat	a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan	1 Terlaksananya kampanye nasional pencegahan stunting	Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Kanal/ Metode	3	3	Pemda Kab/Kota
			2 Persentase keluarga yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	keluarga	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota
			3 Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	keluarga	Persen	70	70	Pemda Kab/Kota
			4 Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	anak berusia di bawah lima tahun (balita)	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota
		b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting	1 Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	kabupaten/kota	Jumlah	-	-	Pemda Prov
			2 Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/kota	desa/kelurahan	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota
			3 Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	70	70	Pemda Kab/Kota
			4 Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Pemda Kab/Kota	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota
			5 Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	desa/kelurahan	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota
			6 Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota
			7 Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR)	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota

7/14/22

		c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting	1	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama	Organisasi Keagamaan	Jumlah	2	2	Pemda Kab/kota
			2	Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	Pasangan calon pengantin	Persen	90	90	Pemda Kab/kota
No	Rencana Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Operasional		Sasaran	Satuan	2023	2024	PJ
3	Pilar 3 : Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemda provinsi, pemda kab/kota dan pemerintah desa	a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah	1	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)	Provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah	-	-	Kementerian Dalam Negeri
			2	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	kabupaten/kota	Persen	-	-	Pemda Prov
			3	Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa)	desa/kelurahan	Persen	-	-	Pemda Kab/Kota
			4	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam penurunan stunting	desa/kelurahan	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota
			5	Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	desa/kelurahan	Persen	-	-	Pemda Kab/Kota
			6	Persentase desa/kelurahan yang melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	desa/kelurahan	Persen	100	100	Pemda Kab/Kota
			7	Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	calon pengantin/calon ibu	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota
			8	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota
			9	Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Ibu hamil	Persen	80	80	Pemda Kab/Kota
			10	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Bayi usia kurang dari 6 bulan	Persen	80	80	Pemda Kab/Kota

Handwritten signature or initials in blue ink.

			11	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Anak usia 6-23 bulan	Persen	80	80	Pemda Kab/Kota
			12	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	anak berusia di bawah lima tahun (balita)	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota
			13	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	anak berusia di bawah lima tahun (balita)	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota
			14	Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting	kabupaten/kota	Persen	100	100	Pemda Prov
			15	Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting	kabupaten/kota	Persen	90	90	Pemda Prov
		b. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	1	Cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting	Keluarga Berisiko Stunting	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota
			2	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	Calon Pasangan Usia Subur (PUS)	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota
			3	Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	Remaja Putri	Persen	90%	90%	Pemda Kab/Kota
			4	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting	keluarga berisiko stunting	Data	2	2	Pemda Kab/Kota
			5	Persentase kabupaten/kota dengan <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> (15-19) apling sedikit 18 per 1000	kabupaten/kota	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota
			6	Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan	Ibu hamil	Persen	70	70	Pemda Kab/Kota
			7	Persentase unmeet need pelayanan keluarga berencana	Catin/ CaPus	Persen	7,4	7,4	Pemda Kab/Kota
No	Rencana Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Operasional		Sasaran	Satuan	2023	2024	PJ
4	Pilar 4 : Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat	a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana	1	Persentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Keluarga Berisiko Stunting	Persen	50	50	Pemda Kab/Kota
			2	Persentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Keluarga Berisiko Stunting	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota

84

			3	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dan atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI)	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta)	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota
			4	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	Calon Pasangan Usia Subur (PUS)	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota
			5	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	Calon Pasangan Usia Subur (PUS)	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota
			6	Cakupan pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	Calon Pasangan Usia Subur (PUS)	Persen	90	90	Pemda Kab/Kota
		b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	1	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Pemda Kab/Kota	Persen	75	75	Pemda Kab/Kota
No	Rencana Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Operasional	Sasaran	Satuan	2023	2024	PJ	
5	Pilar 5 : Penguatan dan Pengembangan Sistem, Data, Informasi, riset dan Inovasi	a. Melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting	1	Persentase Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	90	90	Kementerian Dalam Negeri
			2	Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Pemerintah desa	Persen	90	90	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
			3	Publikasi data stunting tingkat kabupaten/kota	Pemda Kab/Kota	Jumlah	1	1	Pemda Kab/Kota
			4	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi startegi nasional Percepatan Penurunan Stunting		Jumlah	2	2	BKKBN/ DP3AP2KB
			5	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah daerah provinsi	Jumlah	2	2	Pemda Prov
			6	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah	2	2	Pemda Kab/Kota
			7	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di Pemerintah Desa	Pemerintah Desa	Jumlah	2	2	Pemerintah Desa

1/64 X

			8	Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) stunting	anak berusia di bawah dua tahun (baduta) stunting	Persen	50	50	Pemda Kab/Kota
		b. Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu	1	Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara terintegrasi		Data	-	-	Kementerian Keuangan
			2	Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting		Data	-	-	Kementerian Perencanaan, Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
			3	Tersedianya data keluarga berisiko stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)		Data	2	2	Pemda Kab/kota
			4	Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah		Jumlah	-	-	BKKBN/ DP3AP2KB
			5	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	kabupaten/kota	Persen	100	-	Pemda Provinsi
		c. Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	1	Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi	kabupaten/kota	Persen	100	100	BKKBN/ DP3AP2KB
		d. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan	1	Tersusunnya platform berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan Stunting		Jumlah	-	-	Kementerian Perencanaan, Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
			2	Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting		Jumlah	-	-	Kementerian Dalam Negeri
			3	Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi		Jumlah	-	-	Kementerian Keuangan
			4	Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan Stunting		Jumlah	1	1	Kementerian Keuangan

44 YL

No	Rencana Aksi	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Operasional	Sasaran	Satuan	Tahun		PJ
						2023	2024	
Matrik RAN-PASTI								
1	Kluster Data Presisi	a. Penyediaan Data Keluarga Beresiko Stunting	1 Pendidikan Keluarga Beresiko Stunting	Keluarga Beresiko Stunting	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			2 Pendataan Catin/Calon PUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah dan Penapisan Catin/Calon PUS dengan pemeriksaan kesehatan					
			a. Tersedianya data Catin/ CaPus 3 (tiga) bulan sebelum menikah	Catin/CaPUS	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			b. Tersedianya data Catin/ CaPus yang terdeteksi anemia	Catin/CaPUS	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			c. Tersedianya data status gizi Catin/ CaPus (kurus <18,4/ normal 18,5-25/ gemuk >25)	Catin/CaPUS	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			3 Pendataan Ibu Hamil					
			a. Tersedianya data ibu hamil	Ibu hamil	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			b. Tersedianya data ibu hamil dengan 4 (empat) Terlalu	Ibu hamil	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			c. Tersedianya data ibu hamil dengan anemia	Ibu hamil	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			d. Tersedianya data ibu hamil KEK	Ibu hamil	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			e. Tersedianya data ibu hamil dengan pertumbuhan janin terhambat (PJT)	Ibu hamil	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			4 Pendataan PUS pasca persalinan dan masa interval yang termutakhirkan	Ibu Pascapersalinan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			5 Pendataan PUS ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi yang belum ber-KB	PUS 15-49 tahun	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			6 Pendataan dan penapisan anak usia 0-23 bulan					
			a. Tersedianya data anak 0-23 bulan	Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			b. Tersedianya data anak 0 bulan dengan berat badan <2.500 gram	Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			c. Tersedianya data anak 0 bulan dengan panjang badan <48 cm	Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			d. Tersedianya data anak 0-6 bulan yang menerima ASI eksklusif	Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			e. Tersedianya data anak 0-23 bulan yang mendapat MPASI	Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			f. Tersedianya data anak 0-23 bulan dengan diare kronis	Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			g. Tersedianya data anak 0-23 bulan dengan gizi kurang	Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			h. Tersedianya data anak 0-23 bulan dengan gizi buruk	Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			i. Tersedianya data anak 0-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			j. Tersedianya data anak 0-23 bulan yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standar	Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			k. Tersedianya data anak 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar	Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			7 Pendataan dan penapisan anak usia 24-59 bulan					
			a. Tersedianya data anak 24-59 bulan	Anak usia 24-59 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			b. Tersedianya data anak 24-59 bulan dengan diare kronis	Anak usia 24-59 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota

\$ 14/2-

			c.	Tersedianya data anak 24-59 bulan dengan gizi kurang	Anak usia 24-59 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
			d.	Tersedianya data anak 24-59 bulan dengan gizi buruk	Anak usia 24-59 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
			e.	Tersedianya data anak 24-59 bulan yang diukur berat badan dan tinggi badan sesuai standar	Anak usia 24-59 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
			f.	Tersedianya data anak 24-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar	Anak usia 24-59 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
			8	Pendataan dan penampisan keluarga prasejahtera penerima program bantuan sosial						
			a.	Tersedianya data keluarga prasejahtera penerima program bantuan sosial	Keluarga Prasejahtera	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
			b.	Tersedianya data keluarga penerima manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, anak berusia dibawah 2 tahun yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur	Keluarga Prasejahtera	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
			c.	Tersedianya data PUS prasejahtera yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Keluarga Prasejahtera	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
			d.	Tersedianya data PUS prasejahtera yang memperoleh bantuan pangan non tunai	Keluarga Prasejahtera	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
			e.	Tersedianya data PUS prasejahtera yang memperoleh Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Keluarga Prasejahtera	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
			9	Pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui dan/atau yang memiliki anak 0-23 bulan terhadap akses air minum layak	Keluarga memiliki remaja, dan/dengan ibu hamil/atau ibu menyusui dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap akses air minum layak	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
			10	Pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui dan/atau yang memiliki anak 0-23 bulan terhadap sarana rumah sehat	Keluarga memiliki remaja, dan/dengan ibu hamil/atau ibu menyusui dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
			11	Pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui dan/atau yang memiliki anak 0-23 bulan terhadap kepemilikan jamban sehat	Keluarga memiliki remaja, dan/dengan ibu hamil/atau ibu menyusui dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
			12	pendataan desa prioritas Stunting	Desa	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
		b.	Surveilans keluarga beresiko Stunting	Penyelenggaraan surveilans keluarga beresiko Stunting	Keluarga Beresiko Stunting	Persen	75	100	Pemerintah Kab/Kota	
2	Kluster Operasional	a.	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	1	Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh desa/kelurahan	Desa/Kelurahan	Persen	100	100	Pemerintah Desa/ Kelurahan
				2	Orientasi manajemen dan subtransi Stunting bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK)	Tim Pendamping Keluarga (TPK)	Persen	100	100	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, TPK

84/26

			3	KIE Kelompok keluarga beresiko Stunting	Desa/Kelurahan	Persen	85	90	Pemerintah Desa/ Kelurahan
			4	KIE Interpersonal kepada keluarga beresiko Stunting	Keluarga Beresiko Stunting	Persen	40	50	Pemerintah Desa/ Kelurahan
			5	Pendampingan ibu hamil	ibu hamil	Persen	85	90	Pemerintah Kab/Kota
					ibu hamil anemia	Persen	75	80	Pemerintah Kab/Kota
					ibu hamil KEK	Persen	85	90	Pemerintah Kab/Kota
					ibu hamil dengan pertumbuhan Janin Terhambat (PJT)	Persen	75	80	Pemerintah Kab/Kota
			6	Pendampingan ibu pasca persalinan	PUS pascapersalinan	Persen	60	70	Pemerintah Kab/Kota
			7	Pendampingan PUS ingin anak ditunda (IAT) atau tidak ingin anak lagi (TIAL)	PUS	Persen	7.7	7.4	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota
			8	Pendampingan keluarga dengan anak usia 0-23 bulan	keluarga dengan anak usia 0-23 bulan	Persen	85	90	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota
					keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat badan <2.500 gram	Persen	85	90	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota
					keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang <48 cm	Persen	85	90	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota
					keluarga dengan anak usia 0-6 bulan	Persen	70	80	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota
					keluarga dengan anak usia 6-23 bulan	Persen	70	80	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota
					keluarga dengan anak usia 0-23 bulan	Persen	94.6	95	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota
					keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan diare kronis	Persen	70	80	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota
					keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang	Persen	80	90	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota
					keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk	Persen	80	90	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota
			9	Pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan balita 0-23 bulan sesuai standar/usia	Balita 0-23 bulan	Persen	80	90	TPK, Puskesmas
			10	Pemantauan perkembangan balita 0-23 bulan sesuai standar/usia	Balita 0-23 bulan	Persen	80	90	TPK, Puskesmas
			11	Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis	Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis	Persen	70	80	TPK, Puskesmas
			12	Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang	Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang	Persen	80	90	TPK, Puskesmas

84/2

			13	Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk	Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk	Persen	80	90	TPK, Puskesmas	
			14	Pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan balita 0-59 bulan sesuai standar/usia	balita 0-59	Persen	80	90	TPK, Puskesmas	
			15	Pemantauan perkembangan balita 0-59 bulan sesuai standar/usia	balita 0-60	Persen	80	90	TPK, Puskesmas	
			16	Fasilitasi keluarga prasejahtera beresiko stunting penerima bantuan sosial						
			a.	Keluarga prasejahtera berisiko stunting penerima bantuan sosial	Keluarga Prasejahtera berisiko stunting	Persen	85	90	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota	
			b.	Keluarga prasejahtera penerima manfaat variasi bantuan pangan selain beras dan telur	Keluarga Prasejahtera berisiko stunting	Persen	85	90	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota	
			c.	PUS miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Keluarga Prasejahtera berisiko stunting	Persen	85	90	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota	
			d.	PUS yang memperoleh bantuan pangan non tunai	Keluarga Prasejahtera berisiko stunting	Persen	85	90	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota	
			e.	PUS miskin yang memperoleh Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Keluarga Prasejahtera berisiko stunting	Persen	85	90	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota	
			17	Fasilitasi terhadap akses air minum layak bagi keluarga beresiko stunting	Keluarga beresiko stunting	Persen	85	90	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota	
			18	Fasilitasi Kepemilikan Rumah layak huni bagi keluarga beresiko stunting	Keluarga beresiko stunting	Persen	85	90	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota	
			19	Fasilitasi jamban sehat bagi keluarga beresiko stunting	Keluarga beresiko stunting	Persen	85	90	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota	
			20	Dapur Gizi Keluarga di desa prioritas Stunting berbasis pangan lokal	Desa	Persen	60	70	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota	
		b.	Pendampingan Semua Calon Pengantin Calon Pasangan Usia Subur (PUS)	Pendampingan Catin/CaPUS 3 (Tiga) bulan sebelum menikah	Catin/CaPUS	Persen	80	90	Pemerintah desa/kelurahan	
					Catin/CaPUS Anemia	Persen	100	100	Pemerintah Kab/Kota	
					Catin/CaPUS dengan status gizi (kurus/gemuk)	Persen	100	100	Pemerintah Desa, Pemerintah Kab/Kota	
		c.	Audit Kasus Stunting	1	Terbentuknya tim audit kasus Stunting di kab/kota	kab/kota	Persen	100	100	Pemerintah Kab/Kota
				2	Pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga	kab/kota	Persen	100	100	Pemerintah Kab/Kota
				3	Diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga	kab/kota	Persen	100	100	Pemerintah Kab/Kota
				4	Tindak Lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga	kab/kota	Persen	100	100	Pemerintah Kab/Kota
3	Kluster Manajerial	a.	Perencanaan dan penganggaran	1	Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat kab/kota					

8/6/20

			a.	Persentase kab/kota yang meningkatkan alokasi APBD minimal 10 % untuk percepatan penurunan stunting dari tahun sebelumnya	Pemerintah Kab/Kota	Persen	100	100	Pemerintah Kab/Kota	
			b.	Persentase kab/kota yang mengalokasikan prporosi 70% anggaran intervensi sensitif, 25% anggaran inntervensi spesifik dan 5% anggaran intervensi koordinatif	Pemerintah Kab/Kota	Persen	100	100	Pemerintah Kab/Kota	
			2	Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat desa	Pemerintah desa	Persen	100	100	Pemerintah desa	
		b.	Pengawasan dan Pembinaan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting	Pemerintah Kab/Kota	Persen	100	100	Pemerintah Kab/Kota	
		c.	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	1	Pengemban meta data	Kementerian/ Lembaga	Dokumen	-	-	BKKBN (Pusat pengendali)
				2	Pengemban SOP mekanisme sharing data	Kementerian/ Lembaga	Dokumen	-	-	BKKBN (Pusat pengendali)
				3	Operasional pengelolaan Pusat Pengendalian data Stunting	Kementerian/ Lembaga	Sistem	1	-	BKKBN (Pusat pengendali)
				4	Forum Satu data PASTI	Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah	Kegiatan	2	2	BKKBN (Pusat pengendali)
				5	Pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah provinsi dan kab/kota dalam konvergensi percepatan penurunan stunting	Pemerintah Kab/Kota	Persen	85	90	Kemendagri
				6	Pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah desa dalam konvergensi percepatan penurunan stunting	Desa	Persen	85	90	Pemerintah Kab/Kota

